

**LAPORAN HASIL RAPAT KERJA DPRD PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG
KE DEPUTI BIDANG INVESTASI DAN PERTAMBANGAN KEMENKO
KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI DAN DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DKI JAKARTA
TANGGAL 10 sd 13 AGUSTUS 2020**

I. DASAR PELAKSANAAN

Dasar pelaksanaan Kunjungan Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

1. Surat Tugas dari Pimpinan DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung Nomor : 093/ /ST/DPRD/2020 tanggal Agustus 2020
2. Jadwal Kegiatan DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung bulan Agustus 2020

II. PELAKSANAAN

Hari / Tanggal : Senin sd Kamis/10 sd 13 Agustus 2020
Hari/tanggal : Selasa, 11 Agustus 2020
Pukul : 15.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Deputi Bidang Investasi dan Pertambangan Kemenko
Kemaritiman dan Investasi RI
Hari/tanggal : Rabu, 12 Agustus 2020
Pukul : 09.30 WIB sd selesai
Tempat : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi DKI Jakarta

III. PERSONALIA

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1. Ir. AGUNG SETIAWAN, MM | Wakil Ketua Komisi |
| 2. RINA TAROL, SE | Anggota |
| 3. RUDI HARTONO | Anggota |
| 4. EKA BUDIARTHA, S.Mn, M.Si | Anggota |
| 5. NURHAYATI | Notulis |

Pihak Deputi Bidang Investasi Pertambangan

1. Ir. NAJAMUDDIN, MT
2. Dr. VAN BESTER

Pihak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. AGUS NUGROHO
2. KHAIRUNNISA
3. PRISCA ANGGIA

IV. HASIL KUNJUNGAN

Dari Kunjungan Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke Deputi Bidang Investasi dan Perambangan sebagai berikut :

1. Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung mendampingi Ketua DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi terkait tata kelola ekspor produk mineral timah dari Bangka
2. Kunjungan kerja di terima oleh Plt. Asisiten Deputi Bidang Investasi dan Pertambangan Bpk. Ir. Najauddin, MT
3. Dalam pertemuan tersebut Ketua DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung mempertanyakan ekspor mineral Timah dari Bangka Belitung
4. Ekspor timah Berdasarkan RKAB terhadap perusahaan dan dalam antrian tidak diperbolehkan tahun 2018 dan tetapi untuk tahun 2020 ini ada pengeksporan
5. Untuk kedepannya pertimahan merupakan bagian dari Negara dan kalau tidak dipikirkan akan membuat timah anjlok
6. Toni Purnama juga menjelaskan bahwa sudah melakukan RDP dengan pihak terkait, PT. Timah jelas reklamasinya dan sangat berbeda dengan swasta yang reklamasinya tidak jelas dan harus ada ketegasan dari Kementerian dan investasi
7. Ir. Agung Setiawan juga menyampaikan bahwa kondisi Bangka Belitung timah yang di kelola pihak swasta tidak jelas dan meninggalkan lokasi rusak. Dan tujuan kedepannya bagaimana timah kedepan bisa diamankan karena di memiliki kandungan 17 mineral
8. Bong Ming Ming juga menyampaikan bahwa RKAB hanya persyaratan saja , dan terjadi perampokan harta, luasan bisa dihitung di IUP mereka (swasta). Tidak ada satupun IUP swasta produksi tetapi mendapatkan duit dari mana.dari 7 RKAB yang dikeluarkan tidak ada dampak positif terhadap Negara dan tidak pernah tau royaltinya kemana.

9. Deputi Bidang Investasi dan Pertambangan Kemenko Kemaritiman dan Investasi akan membuat Nota Dinas ke Pak Menteri mengenai ekspor timah ini dan sangat mendukung sekali penegakan hukum karena 7 rkab tidak ada kontribusi terhadap Negara

Dari Kunjungan Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

1. Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dalam rangka sharing tentang Pembangunan Rumah Subsidi di saat Pandemi Covid-19
2. Provinsi DKI membawahi 6 wilayah termasuk kepulauan seribu dijelaskan Dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta. Dasar dari pembangunan rusun dari 5 wilayah ini dan mempunyai decklock perumahan disebar 6 wilayah dan direalisasikan rusun tentunya belum sampai memenuhi target pertahunnya 14 rb khusus untuk pemda DKI
3. 14 rb di bagi pertahun dari RPJMD dalam kurun waktu 5 tahun sebesar 14rb diakui belum sampai memenuhi 14 rb dalam 5 tahun
4. Dari 2018 rencana realaisani yan di ambil 7rb 2019 kosong 20 kosong dan mungkin realisasi di tahun 21. Barometer perumahan berbentuk unit blm bs di raelisasi tetapi peaksnaan pemanguna sdudah berjalan rusunakhir tahun 21
5. Bedirinya dinas perumahan, tahun 1986 sampai sekarang proses ada perbedaaan rusun sewa beli yang tersebar di jaktim,pusat, jaksel
6. Rusun sewa total 5 wilayah smpi 2018 149 block, 49 towr, dan hunian 25.800 yang sudah tersebar
7. Pembagian wialyah jakut,jakbar 17 block 12 tower sekitar. 13rb hunian jaktim dan jakut paling banyak dan jakpus baru satu di rawasari ada 2 block, dan dua type 20 dan 21, Jaksel yang baru selesai 2018
8. Bahwa 2019,2020,2021, secara renta dinas kosong bukan bearti tidak melaksanakan pembangunan tetapi pembangunan sedang berjalan da nada 26 tower, tiap tiap lokasi tergantung ketinggiannya 18-24 lantai tetap mengaju type dikembangkan type 36 sudah terdiri dari ruang tamu, kamar tidur 2.

V. KESIMPULAN

1. DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung mengharapkan adanya kejelasan terhadap pertimahan di Bangka Belitung darimana asal usul barang yang tidak jelas dan rkab yang dikeluarkan harus jelas/ditertibkan
2. DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung memohon agar di hentikan dan di cabut aturannya
3. Sebagai mitra kepala Daerah DPRD selaku pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, yang memiliki tercapainya tujuan pembangunan daerah sesuai dengan perda perencanaan pembangunan daerah.

VI. PENUTUP

Demikian disampaikan laporan kunjungan kerja Komisi III DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung ke Deputi Bidang Invesasi dan Pertambangan Kemenko Kemaritiman dan Investasi dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pangkalpinang, Agustus 2020

KETUA,

Ir. AGUNG SETIAWAN, MM

**DEPUTI BIDANG INVESTASI DAN PERTAMBANGAN KEMENKO KEMARITIMAN
DAN INVESTASI
TGL 11 AGUSTUS 2020**



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI DKI JAKARTA
TGL 12 AGUSTUS 2020**

